

Judul : Tekan defisit APBN, DPR usulkan genjot pendapatan pajak
Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tekan Defisit APBN

DPR Usulkan Genjot Pendapatan Pajak

ANGGOTA Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris mendorong Pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Langkah itu sebagai respons atas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang nyaris mendekati 3 persen.

Diketahui, hingga akhir Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melampaui proyeksi defisit 2,78 persen. Andi mengatakan, penggenjotan sektor pajak jadi salah satu strategi yang bisa didorong untuk meningkatkan pendapatan.

"Karena belum ada langkah maksimal yang dilakukan untuk meraup tambahan pendapatan pajak, seperti dari sektor energi minyak dan gas," kata Andi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dia juga mendesak Pemerintah memaksimalkan sistem Coretax dalam mengoptimalkan pembayaran pajak, terutama dari pajak dari perusahaan-perusahaan besar. "Dari tambang, mi-

gas, termasuk juga dari banyak potensinya. Apalagi Indonesia ini kan termasuk yang paling banyak potensi mineralnya," tuturnya.

Defisit APBN, lanjut Andi, berpengaruh dari belanja pemerintah. Dia memandang Pemerintah telah menunjukkan niat baik untuk mendorong efisiensi belanja negara di tengah tekanan defisit APBN. Tapi, penajaman kebijakan masih sangat diperlukan di sejumlah kebijakan.

Meski kebijakan-kebijakan itu bisa dinilai positif, pelaksanaannya harus dievaluasi agar benar-benar sebanding, antara besarnya anggaran yang dikeluarkan negara dengan dampak yang dirasakan masyarakat. "Kita harus lihat apakah kebijakan ini betul-betul sejalan, antara pengeluaran dengan impact yang diinginkan masyarakat," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menambahkan, pengelolaan APBN yang disiplin dan berkelanjutan harus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Defisit anggaran harus tetap



Andi Yuliani

dikendalikan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dalam UU.

Defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen, lanjutnya, memang mendekati ambang batas maksimal, tapi posisinya masih berada dalam koridor yang aman secara hukum. "Ke depan, Pemerintah dan DPR harus memastikan defisit tetap terjaga," ujar Anis.

Pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan APBN 2026 disusun dan dilaksanakan sesuai target yang telah disepakati dalam UU APBN. Disiplin fiskal

jadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.

Politikus PKS itu mengingatkan, ke depan belanja negara ke depan harus semakin diarahkan pada program-program prioritas. Program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi global.

"Belanja pemerintah harus fokus, efektif, dan tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga," jelasnya.

Selanjutnya, penguatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, juga jadi hal krusial. Karena itu, dia juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak secara optimal, adil, dan berkelanjutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi, dia mendukung Pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang adaptif dan antisipatif. Sinergi

antara Pemerintah dan DPR dinilai sangat penting untuk memastikan APBN tetap menjadi instrumen stabilisasi ekonomi.

"Kami juga mengapresiasi peran masyarakat mendukung keuangan negara lewat pembayaran pajak. Itu adalah faktor penting menjaga kesinambungan pembangunan nasional," katanya.

Defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen dari PDB disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Katanya, angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan 2024 karena Pemerintah tetap menjaga ekspansi ekonomi melalui kebijakan countercyclical. "Saya bisa saja membuat defisit nol, tapi ekonomi bisa morat-marit," kata Purbaya, Kamis (8/1/2026).

Purbaya meyakini, dengan membaiknya fondasi ekonomi dan momentum ekonomi ke depan, pada 2026 defisit bisa ditekan dengan dampak ekonomi ke masyarakat lebih besar. "Tahun ini, kita asumsikan ekonomi 5,4 persen, kita coba tekan ke level lebih tinggi lagi," tegasnya. ■ PYB